

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pajak Reklame Belum Optimal

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.2

Edisi : Selasa, 14 Agustus 2018

Pajak Reklame Belum Optimal

BANDUNG, (PR).

Capaian pendapatan Pemerintah Kota Bandung per 10 Agustus 2018 ada pada kisaran Rp 1,1 triliun atau Rp 100 miliar lebih banyak dari pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Belum optimalnya pengelolaan pajak reklame masih menjadi salah satu permasalahan.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, seluruh mata pajak menunjukkan pencapaian yang sesuai atau bahkan melampaui target setiap bulannya. Pajak reklame menjadi pengecualian.

Pemkot Bandung tahun ini menar-

getkan pencapaian pajak Rp 2,6 triliun. Ema mengaku optimistis bisa memenuhi target tersebut meskipun ia juga mengakui setelah September 2018, perjuangan petugas bakal lebih berat. Salah satu penyebabnya adalah jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada akhir Agustus 2018.

Per 10 Agustus 2018, Pemkot Bandung baru memperoleh PBB sebesar Rp 299 miliar dari total target Rp 700 miliar. Ema berharap warga bisa lebih disiplin membayarkan pajak pada dua pekan terakhir Agustus ini.

"Kami berharap banyak uang pajak masuk menjelang jatuh tempo PBB akhir Agustus ini. Yang harus kami pikirkan adalah setelah Agustus nanti. Pemasukan bakal agak seret, bisa mengganggu pencapaian target, tetapi kami pastikan petugas bakal terus bekerja keras," tutur Ema, Senin (13/8/2018) siang.

Terkait dengan pajak reklame, Ema menyebut adanya kenaikan pencapaian pajak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Per 10 Agustus 2018, pendapatan masuk sebesar Rp 5,5 miliar. Salah satu faktor penyebab kenaikan adalah penerapan aturan baru berupa pemungutan pajak terhadap titik-titik reklame ilegal.

Meskipun pendapatan mengalami kenaikan, Ema mengakui masih dibutuhkan banyak inovasi dan ketegasan aturan terkait dengan pengelolaan reklame. Salah satu gagasan yang sudah ia lemparkan sejak lama adalah penerapan pajak berdasarkan jumlah materi reklame, bukan dipukul rata biaya selama satu tahun masa tayang.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama menyayangkan berlarutnya permasalahan dalam pengelolaan reklame. Padahal, semua peraturan yang dibutuhkan

Pemkot Bandung untuk memulai kebijakan baru sudah tersedia.

"Perubahan bisa terjadi tergantung dari niat Pemkot Bandung. Saya harus jujur mengatakan niat pemkot sejauh ini masih lemah. Saya mempertanyakan keseriusannya mengelola reklame," tutur Aan.

Menurut Aan, ketidaksungguhan pemkot mengelola reklame tecermin dari pengurusan izin di lapangan. Para pemilik reklame ilegal, yang mendapat sokongan ormas, bisa membuat pemkot takut mengeksekusi aturan baru. Namun, izin reklame baru yang sudah diajukan sesuai aturan, tertahan.

"Pemkot harus menindak tegas reklame ilegal, seperti yang sering dijanjikan pejabatnya. Karena, fakta di lapangan, justru sebaliknya. Reklame ilegal membuat pemkot ragu-ragu mengeksekusi aturan baru," ujar Aan. (Tri Joko Her Riadi)***